

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran masing-masing indikator variabel penelitian, diantaranya:
 - a. Kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 - 2019 berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 28% yang berada pada kategori tingkat kemandirian yang rendah. Sedangkan pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali, rasio kemandirian berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 90% yang berada pada kategori tingkat kemandirian yang tinggi.
 - b. Kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 - 2019 berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 19% yang berada pada kategori kurang mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi. Sedangkan pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali, rasio derajat desentralisasi fiskal berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 30% yang berada pada kategori kemampuan yang sedang dalam menyelenggarakan desentralisasi.
 - c. Kinerja keuangan melalui rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 78% yang berada pada kategori ketergantungan yang sangat tinggi. Sedangkan pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali, rasio ketergantungan cenderung

mengalami penurunan dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 66% yang berada pada kategori ketergantungan yang sangat tinggi.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah dari segi kemandirian keuangan daerah antara pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Dengan rata-rata kabupaten/ kota di Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur. Namun dilihat dari kategorisasi, sebagian besar kabupaten/ kota di Bali maupun Jawa Timur masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah sekali sehingga pola hubungan pemerintah daerah dengan pusat yaitu instruktif, dimana peranan pemerintah pusat masih mendominasi pendapatan daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tersebut.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah dari segi derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Dengan rata-rata kabupaten/ kota di Provinsi Bali memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur. Namun dilihat dari kategorisasi, sebagian besar kabupaten/ kota di Bali maupun Jawa Timur masih termasuk dalam kategori derajat desentralisasi yang kurang, yang berarti keduanya masih kurang mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi dengan pendapatan daerah didominasi oleh transfer dari pusat/provinsi.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah dari segi ketergantungan keuangan daerah antara pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Dengan rata-rata kabupaten/ kota di Provinsi Bali memiliki rasio ketergantungan yang lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur. Namun dilihat dari kategorisasi, sebagian besar kabupaten/ kota di Bali maupun Jawa Timur masih termasuk dalam kategori tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, yang berarti keduanya masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat/ provinsi/ pihak lainnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Diantaranya (1) pengambilan objek penelitian hanya melihat potensi daerah yang relatif sama tetapi tidak memperhatikan sektor unggulan pendorong perekonomian; (2) Banyaknya sampel yang dibandingkan memiliki kuantitas yang cukup jauh sehingga secara rata-rata kurang proporsional untuk dibandingkan dengan menggunakan *uji independent sample t-test*; (3) Indikator penilaian kinerja hanya dilihat dari sisi penerimaan tidak melihat efisiensi kerjanya dari penggunaan anggaran; (4) metode penelitian yang digunakan hanya bersifat deskriptif dan uji beda tanpa menghubungkan dengan konsep lain seperti uji hubungan atau pengaruh. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai masukan dan perbaikan untuk:

1. Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Bali
 - a. Dana perimbangan dari pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah karena adanya celah fiskal yaitu kesenjangan antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah. Sehingga dengan adanya dana perimbangan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran secara efektif untuk menjalankan otonomi daerah, yang mana pengeluaran pemerintah daerah dialokasikan untuk menghasilkan *multiplier effect* yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.
 - b. Sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Timur dan Bali masih memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga harus ada penguatan kontribusi PAD dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah baik kekayaan alam maupun usaha yang potensial, pengembangan badan usaha milik daerah dengan mendayagunakan masyarakat, juga adanya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

- c. Mengingat ketergantungan kabupaten/ kota Jawa Timur dan Bali masih sangat tinggi, sedangkan titik utama desentralisasi berada di tingkat kabupaten/ kota, dan potensi yang dimiliki Jawa Timur sangat kaya seperti banyaknya industri, hasil pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata dan lainnya juga Bali dengan pariwisatanya yang sangat potensial. Maka perlu upaya optimalisasi pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan tidak hanya mengandalkan pendapatan pajak dari sektor unggulan saja, serta melakukan kerja sama antar pemda sehingga pemda dapat saling terbantu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.
- d. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kabupaten/ kota baik di Provinsi Jawa Timur maupun Bali, sehingga perlunya peranan pemerintah provinsi dalam memberikan arah pengembangan potensi daerah, juga peranan masing-masing pemerintah kabupaten/ kota dalam meningkatkan sumber daya yang mendukung perbaikan kinerja daerah dengan melibatkan masyarakat.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Untuk penelitian lanjutan terkait perbandingan kinerja keuangan daerah, perlu diperhatikan karakteristik daerah yang akan dibandingkan, sebaiknya dilihat dari segmentasi daerah yang relatif sama seperti kesamaan sebagai daerah dengan pendorong perekonomian pada industri, pariwisata, dan sebagainya.
- b. Untuk uji beda dengan *independent sample t-test* sebaiknya kuantitas daerah yang dibandingkan selisihnya tidak terlalu besar. Sehingga perlu diperhatikan banyaknya daerah administrasi dari objek yang dibandingkan.
- c. Indikator penilaian kinerja keuangan daerah sebaiknya diperluas, termasuk dari sisi belanja sehingga dapat dilihat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut untuk perbaikan kinerja keuangan selanjutnya.

- d. Metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, namun penelitian bisa lebih bermanfaat lagi jika variabel yang diteliti saling dikaitkan dengan konsep lain sehingga terlihat hubungan atau pengaruh yang bisa dijadikan sebagai kebijakan untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.